



► DUGAAN: SUAP PERIZINAN

Sultan: Haryadi Ingkar Janji

Sunartono & Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X menilai mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, telah mengingkari janjinya. Sebab, sebagai Wali Kota Jogja Haryadi otomatis telah menandatangani pakta integritas yang di dalamnya berjanji tidak korupsi.

"Dihadapi saja proses hukum itu kalau memang melakukan, karena Mas Haryadi sendiri melanggar janjinya sendiri. Karena kan sudah menandatangani pakta integritas. Jadi ya berproses seperti itu ya dilakukan dengan baik saja," ucap Sultan di Kepatihan, Senin (6/6) sore.

Sultan menyayangkan proses transaksi suap hingga berujung OTT tersebut dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota. Padahal Haryadi sendiri sudah purnatugas. "Hanya masalahnya beliau sudah pensiun kenapa pertemuan ada di rumah dinas balai kota yang sebetulnya dia kan sudah tidak berada di situ," ucap Sultan.

Sebagaimana disampaikan KPK pada Jumat (3/6), transaksi suap itu dilakukan di rumah dinas Wali Kota. Uang itu diberikan Vice President Real Estate PT SA Tbk, Oon Nusihono kepada Triyanto yang juga sekretaris pribadi Haryadi.

Sultan menilai penangkapan itu sebagai tindakan konsisten KPK dalam memberantas korupsi. "Berarti KPK konsisten karena melanggar pakta integritas ya berproses hukum. Kalau masalahnya kan saya enggak tahu," ujarnya.

Sultan yakin aparat penegak hukum dalam hal ini KPK akan mengungkap bukti lain terkait perizinan hotel dan apartemen yang diterbitkan selama Wali Kota periode 2017-2022.

Sultan: Haryadi...

"Ya otomatis, mungkin persoalan [OTT] ini hanya sekadar sarana bukti yang bisa dilakukan. Tetapi otomatis mesinnya penegak hukum [KPK] mencari bukti tidak hanya ini, tetapi bukti lain juga mesti dilakukan," katanya.

Dengan adanya sejumlah nuansa di Pemkot Jogja yang disegel KPK, kata Sultan, tentu penyidik akan membawa barang bukti atau dokumen lain, baik itu berupa hotel, apartemen. Hanya saja Sultan menegaskan tidak tahu menahu kasus tersebut.

Sebagaimana diketahui Haryadi diduga menerima suap dari Summarecon Agung Tbk atas pembangunan apartemen Royal Kedhaton di Kemitiran Lor, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Jogja. Lokasi pembangunan ini berada di kawasan cagar budaya Malioboro dan merupakan penyangga kawasan Sumbu Filosofi.

"Itu cagar budaya seperti apa, bangunannya di mana saya enggak tahu. Kan bangunannya juga belum ada, apakah itu betul atau tidak kan saya enggak tahu. Kalau memang itu cagar budaya apakah sudah ada izin dari Balai Purbakala [Balai Pelestarian Cagar Budaya]?" ujar Sultan.

Sebelumnya, KPK menangkap dan menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap IMB apartemen Royal Kedhaton. Selain Haryadi Suyuti, tiga orang lain yang terlibat dalam kasus itu yakni Kepala DPMPPTSP Jogja, Nurwidi Hartana; sekretaris pribadi Haryadi, Triyanto Budi Yuwono. Sementara dari pihak swasta yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Tbk, Oon Nusiho.

Pejabat Pengganti

Pj. Wali Kota Jogja, Sumadi, menunjuk Octo Noor Arafat sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) setelah kepala dinas lama yakni Nurwidi Hartana ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton. "Prosesnya sudah sesuai ketentuan karena yang definitif terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) sehingga diberhentikan sementara sembari menunggu proses persidangan yang memiliki kekuatan hukum tetap," kata Sumadi, Senin.

Menurutnya, proses pemilihan Octo sudah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Ia dianggap sosok yang tepat dalam mengisi kekosongan Kepala DPMPPTSP dan diharapkan bisa menjalani tugas dengan optimal. Octo yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu telah bertugas sebagai Kepala DPMPPTSP.

Di sisi lain untuk menunjuk Plh prosesnya juga tidak rumit dalam menunjukan Pelaksana Tugas (Plt). Hal ini dikarenakan proses penunjukan Plh tidak memerlukan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. "Per hari ini [kemarin] sudah mulai menjalani tugas sebagai Plh, saya tidak mau proses pelayanan terhambat. Sudah saya tandatangani, kan tidak perlu rekomendasi dari Kemendagri karena sementara, belum ada ketetapan hukumnya itu," ujarnya.

Sosialisasi ke Warga

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja mengungkap sejumlah hal yang biasanya cenderung dilanggar oleh pengusaha saat membangun hotel atau apartemen di Jogja. Fenomena ini tentunya harus dicermati secara serius mengingat kasus dugaan suap yang menjerat Haryadi Suyuti dan seorang kepala dinas di lingkungan Pemkot Jogja baru-baru ini.

Anggota Forpi Kota Jogja, Baharuddin Kamba, menjelaskan persoalan yang pertama yaitu menyangkut sosialisasi kepada warga sekitar area pembangunan. Ia menilai kegiatan sosialisasi cenderung tidak melibatkan masyarakat. Kalau pun ada, hanya segelintir warga saja yang diikutsertakan.

"Biasanya sosialisasi yang hanya lebih banyak melibatkan masyarakat yang pro terhadap pembangunan," ujarnya.

Hal ini wajar belaka, sebab pelaksana pembangunan biasanya menghindari timbulnya persoalan baru jika mengundang masyarakat yang kontra terhadap rencana pembangunan. Oleh karenanya, pendekatan dan sosialisasi lebih gencar dilakukan kepada warga yang pro terhadap rencana pembangunan meski melanggar ketentuan. "Yang terakhir adalah soal kesepakatan antara warga dan pengembang meskipun di akta notarisasi tetapi sering kali hal tersebut diingkari. Peningkatan kerap terjadi pada saat pergantian manajemen," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005